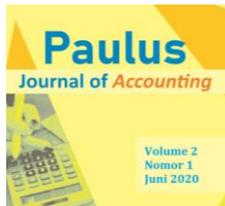


**PENGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DALAM KAITANNYA  
DENGAN PENYAJIAN DAN AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN**

Carolus Askikarno Palalangan<sup>1</sup>, Maria Yessica Halik<sup>2</sup>, Frischa Faradilla Arwinda  
Mongan<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia Paulus  
carolus@ukipaulus.ac.id



e-ISSN 2715-7474

p-ISSN 2715-9892

**Informasi Artikel**

Tanggal masuk

**08 April 2021**

Tanggal revisi

**12 Mei 2021**

Tanggal diterima

**30 Juni 2021**

**Kata Kunci:**

Keuangan Daerah <sup>1</sup>

Penyajian <sup>2</sup>

Akseibilitas<sup>3</sup>

Laporan Keuangan <sup>4</sup>



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dan untuk mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas keuangan daerah terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar dan variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) di lingkungan pemerintahan Kota Makassar.

**PENDAHULUAN**

Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Abdullah (2010) menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah dapat diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dan menurut Sanjaya (2004) menyatakan bahwa adanya

perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia pada saat ini menimbulkan beberapa tuntutan mengenai penggunaan informasi keuangan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberiaan informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik seperti memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi keuangan pemerintah daerah berupa laporan keuangan.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomi, efisien dan akuntabel. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama, agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintahan daerah.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting yang menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diiktisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dari beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut yaitu : dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rohman (2009) yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Bandariy (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Adapun hasil yang dari penelitian tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Ramadhani,dkk.(2014) juga melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas terhadap penggunaan laporan keuangan daerah, dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh

Saputra (2012) memberikan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Menurut Anthony dan Vijay (2005) teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak *principal* membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplicit, dengan pihak lain *agent* dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang. Lupia dan McCubbis (2002) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang atau prinsipal memilih orang atau kelompok lain agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

### **Penyajian Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi tersruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen yang menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Menurut Wahidah (2015) penyajian laporan keuangan daerah merupakan informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 . Terdapat 5 indikator karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki oleh pihak pengguna laporan keuangan.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesibilitas (*accessibility*) hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudah agar masyarakat dapat mendapatkan informasi keuangan tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aksesibilitas apabila dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan ( Mulyana, 2006).

Laporan keuangan harus dapat di mengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly et al, 1992, dalam Rohman, 2009). Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan.

### **Penggunaan Informasi Keuangan**

Penggunaan informasi keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali apa saja informasi- informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan daerah. Menurut Saputra (2012) penggunaan informasi keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat di akses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut Aliyah dan Aida (2012). Penggunaan informasi keuangan daerah sangat penting dilakukan karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan berbagai analisis.

### **Pengembangan Hipotesis**

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah yang belum mampu untuk menyajikan laporan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. Fator utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana penilaian tanggungjawab itu selanjutnya kita kembalikan lagi ke pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi yang terkait sebagai alat ukur kinerja manajemen dipemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela. Hasil *feedback* dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan inilah yang menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja mereka selama tahun anggaran berlangsung.

**H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.**

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau keadaan

untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly *et al.*, 1990, dalam Rohman, 2009).

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar pengguna informasi keuangan daerah.

**H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan.**

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di SKPD tepatnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan pertimbangan bahwa sangat relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan daerah Kota Makassar, yang dalam hal ini yang menjadi populasi yang dituju oleh peneliti adalah OPD yang tepatnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Makassar dengan responden kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, dan pegawai yang di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) menggunakan teknik *proporsionate stratified random sampling*; yakni, suatu teknik pemilihan sampel yang apabila populasinya tidak seragam (heterogen) yang terdiri dari beberapa kelompok dengan kategori yang berbeda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terkait) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian

(Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2= tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4= setuju, Skor 5 = sangat setuju.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden dan hasil jawaban dari setiap responden pada setiap pernyataan dalam kuisioner atau alat ukur yang digunakan. Total kuisioner yang ditujukan pada ODP kota Makassar berjumlah 100 eksampler sedangkan yang kembali dan dapat diolah hanya 75 eksampler. Adapun rinciannya adalah seperti pada tabel berikut

**Distribusi Pengambilan Kuisioner**

Aktivitas	Jumlah	Persentasi
Kuisioner Yang Disebarkan	100	100%
Kuisioner Yang Kembali	80	80%
Kuisioner Yang Tidak Dapat Diolah	5	5%
Kuisioner Yang Dapat Diolah	75	75%

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel penyajian laporan keuangan (X1) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Descriptive Statistics Variable Penyajian laporan keuangan (X1)**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	Vari ance
X11	75	2	5	3.56	.889	.790
X12	75	2	5	3.59	.824	.678
X13	75	2	5	3.45	.920	.846
X14	75	2	5	3.56	.889	.790
X15	75	1	5	3.45	.859	.738
X1T	75	11	23	17.61	2.471	6.105
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable laporan keuangan dengan bantuan IBM SPSS 25

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Descriptive Statistics Laporan Keuangan daerah (X2)**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	Vari ance
X21	75	2	5	3.45	.741	.548
X22	75	2	5	3.41	.931	.867
X23	75	1	5	3.43	.932	.870
X24	75	1	5	3.47	1.018	1.036
X25	75	2	5	3.37	.802	.643
X2T	75	11	22	17.13	2.500	6.252
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) dengan bantuan IBM SPSS 25

Perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) menggunakan bantuan *IBM SPSS 25* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Descriptive Statistics Variable Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y1	75	1	5	3.99	.979	.959
Y2	75	1	5	4.00	.915	.838
Y3	75	1	5	3.57	1.093	1.194
Y4	75	2	5	3.81	.911	.830
Y5	75	1	5	3.40	1.000	1.000
YT	75	7	24	18.77	3.604	12.988
Valid N (listwise)	75					

Sumber: Olahan data deskriptif variable Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) dengan bantuan IBM SPSS 25

Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.315	3.358		.690	.493
	penyajian laporan keuangan	0.433	.151	.297	2.871	.005
	Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah	0.515	.149	.357	3.455	.001

a. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  $Y = 2.315 + 0,433X_1 + 0.515X_2 + e$

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 (df = 73; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan daerah karena itu merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas yang diberikan pemerintah kepada publik. Sehingga publik bisa menggunakan informasi keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik Mardiasmo (2014: 30). Oleh karena itu pihak pemerintah harus senantiasa memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan teori sinyal. Dalam teori keagenan dibahas tentang masalah keseimbangan informasi atau dikenal dengan assimetri information. Dalam hal ini keterkaitan antara keseimbangan informasi dapat dilihat pada pihak penyaji dan pihak pengguna dimana kedua pihak ini harus memiliki keseimbangan informasi. Pihak penyaji harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak pengguna tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan dalam teori sinyal juga dibahas tentang pemberian sinyal berupa informasi-informasi yang berasal dari pemerintah kepada para pengguna laporan keuangan. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis pertama yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan informasi keuangan daerah oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa ketika entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan dengan baik maka hal tersebut dapat dinikmati atau dipergunakan oleh para pengguna informasi keuangan. Ketika informasi keuangan pemerintah telah dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut bisa dinilai transparansi dan akuntabilitasnya oleh para pengguna laporan keuangan. Berarti laporan keuangan pemerintah telah mampu dipertanggungjawabkan kepada para pengguna laporan keuangan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,87 lebih besar dibanding nilai t tabel 1,984 ( $df = 73$ ; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,005 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Penyajian laporan keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima.

Penggunaan informasi keuangan yang baik tergantung kepada bagaimana akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami oleh para pengguna laporan tersebut. Dalam hal ini akses yang biasa diberikan untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan salah satunya website. Hal ini sejalan dengan teori sinyal yang diungkapkan oleh Tjandrakirana dan Meva (2014) yang menyatakan bahwa teori sinyal menjelaskan mengenai alasan perusahaan memberi informasi laporan keuangan kepada pihak luar dan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada pihak pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan atau informasi mengenai perusahaan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah bahwa ada korelasi serta distribusi yang signifikan antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan semakin tinggi pula penggunaan informasi keuangan daerah, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian hasil ini menunjukkan adanya kecocokan antara kenyataan dengan teori yang ada.

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang diperoleh adalah hipotesis kedua diterima. Ini berarti makin baik aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan informasi keuangan daerah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. Dalam hipotesis kedua ini, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah maka dapat dikatakan bahwa semakin baik akses yang diberikan oleh pihak

pemerintah kepada pihak pengguna informasi keuangan maka akan semakin baik pula informasi tersebut dapat digunakan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah memberikan akses kepada publik maka pemerintah memiliki tanggung jawab kepada publik untuk memberikan kemudahan dalam hal pengaksesan laporan keuangan melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Dari hasil uji signifikansi F menunjukkan bahwa nilai  $f$  sebesar 12,289 lebih besar dibanding nilai  $f$  table 3,090 ( $df = 73$ ; tingkat signifikansi 0,05) dengan signifikansi 0,00 lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Penyajian laporan keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) di lingkungan pemerintahan Kota Makassar.

## SIMPULAN

Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) Aksesibilitas Laporan Keuangan daerah (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan Makassar (Y). Variabel Penyajian laporan keuangan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah lingkungan pemerintahan Kota Makassar. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2015. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis perekonomian Daerah Blog Syukriy Abdullah. <https://syukriy.wordpress.com/otonomi-daerah-sebagai-upaya-memperkokoh-basisperekonomian-daerah/>.
- Diamond Jack. 2002. "Performance Budgeting-Is Accrual Accounting Required?". *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Departement*.
- Edy, Sujana dkk. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 8. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon). *Jurnal, UNISSULA*.
- Laura, Manuel Pedro, Andres Navarro. 2015. Governance, transparency and accountability: An international comparison. Paper

- N, Wahida . 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksestabilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Konawe Utara*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nursiam, Dian. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali). *Jurnal, FEB UMS*.
- Peggy, Sande. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal, Universitas Negeri Padang*.
- Putri, F. E. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 483–497.
- Saragih, Charli Andreas. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun). *Jurnal, Universitas Sebelas Maret*.
- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4(1), 571–586.
- Steccolini, Ileana. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?* EIASM Conference on Accounting and Auditing in Pablik Sector Reforms, Dublin. (September 2002).
- Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sijunjung). *JOM Fekom, Vol.4 No.1*, 2015–2029.